

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi pada dasarnya dicerminkan oleh terjadinya perubahan dalam aliran-aliran baru yang menyangkut arus pendapatan dan manfaat (benefit) kepada masyarakat lokal, regional, bahkan sampai nasional. Program pembangunan dapat mendatangkan dampak berupa manfaat-manfaat yang positif atau negatif kepada masyarakat, terutama kepada mereka yang tinggal di dekat sekitar kegiatan ekonomi sebagai penerima dampak dari program pembangunan yang bersangkutan. Komunitas lokal harus mencari atau mendapat peluang agar terjadi penyesuaian terhadap perubahan karena keadaan baru tersebut (Achmadi, 1995).

Pembangunan dapat dikonseptualisasikan ke dalam proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat atau suatu sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang baik atau manusiawi (Iryanti, 2003). Rencana pembangunan atau pengembangan yang dihasilkan oleh tenaga ahli atau konsultan pada umumnya berasal dari budaya atau latar belakang sosial yang berbeda dalam mengatasi permasalahan penting yang ditemukan. Rencana pembangunan dimulai dengan mengenali potensi dan kebutuhan masyarakat yang mendapat manfaat. Dengan demikian kegiatan pembangunan yang mencakup perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi akan bertitik tolak dari keinginan dan kemampuan masyarakat penerima manfaat dan penanggung risiko itu sendiri.

Seseorang melakukan pekerjaan dengan tujuan tertentu yaitu memenuhi kebutuhan primer, sekunder dan tersier bagi diri sendiri dan untuk berinvestasi. Kebutuhan adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang seperti kebutuhan jasmani dan rohani. Baik pekerjaan yang bersifat sektor formal maupun sektor informal.

Lapangan kerja sektor formal menjadi prioritas bagi para tenaga kerja. Namun adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia beberapa tahun lalu, mengakibatkan banyak terjadi PHK pada sektor formal, sehingga menambah jumlah angka pengangguran. Banyaknya masyarakat yang tidak memperoleh pekerjaan, sehingga mereka mencoba mengadu nasibnya dengan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, sebagai *self employment* yang akhir-akhir ini dikenal sebagai sektor informal. Lapangan kerja sektor informal perlu dikembangkan, hal ini dikarenakan sektor informal sangat membantu kepentingan masyarakat, yaitu menyediakan lapangan pekerjaan dengan penyerapan tenaga kerja secara mandiri dengan kata lain menjadi *safety-belt* bagi tenaga kerja yang memasuki pasar kerja, selain itu juga menyediakan kebutuhan masyarakat golongan menengah ke bawah (Kuncoro, 1997).

Pembengkakan sektor informal disebabkan oleh ketidakmampuan sektor formal menyerap lebih banyak tenaga kerja. Ketidakmampuan sektor formal ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk melebihi kecepatan penyediaan lapangan pekerjaan. Dengan demikian, kegiatan ekonomi sektor informal menjadi alternatif utama untuk mengurangi pengangguran (Fransiska.R.Korompis, 2002:2). Masalah pengangguran terselamatkan oleh sektor informal yang lebih bisa menyerap tenaga kerja.

Konsep “sektor informal” diperkenalkan oleh Keith Hart, ahli ekonomi dari Inggris yang melakukan penelitian tentang ekonomi di daerah perkotaan Ghana yang kemudian di adopsi oleh ILO di dalam kegiatan penelitian di Kenya. Makalah yang dikeluarkan ILO membedakan sektor informal dengan sektor formal dari sisi yang tidak ada di sektor informal dan yang ada di sektor formal. Istilah ini mengacu pada kegiatan-kegiatan ekonomi berskala kecil dan tidak terdaftar (ILO 2002). Sektor informal dibangun atas basis unit usaha. Dengan semikian, istilah ini tidak mencakup hubungan kerja subkontrak atau *outsourcing* yang dilakukan usah-usaha formal. Pedagang Kaki Lima dianggap sebagai kegiatan informal yang tidak tercatat, maka kontribusi ini tidak dihitung, maka pendekatan yang diambil pemkot

terhadap kelompok Pedagang Kaki Lima terutama adalah pendekatan yang bersifat pengaturan/kontrol dan pelanggaran.

Pedagang kaki lima adalah orang dengan modal relatif sedikit berusaha di bidang produksi dan penjualan dan penjualan barang-barang (jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan tertentu di dalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal (Winardi dalam Haryono, 1989). Pedagang kaki lima merupakan salah satu jenis perdagangan dalam sektor informal, yakni operator usaha kecil yang menjual makanan, barang dan atau jasa yang melibatkan ekonomi uang dan transaksi pasar.

Pedagang kaki lima sudah menjadi bagian dari wajah suatu perkotaan serta sebagai identitas untuk beberapa daerah sebagai tujuan wisata. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan pedagangkaki lima memberikan potensi ekonomi yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Pedagang kaki lima mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar sehingga mampu mencukupi kebutuhan hidup sebgaiian besar masyarakat. Namun berkembangnya keberadaan pedagang kaki lima mengakibatkan terganggunya fungsi fasilitas umum seperti ketentraman, ketertiban masyarakat, kebersihan lingkungan dan kelancaran lalu lintas. Dengan begitu, dibutuhkan upaya untuk pengaturan agar terciptanya tertib sisal dan ketentaraman masyarakat dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat.

Permasalahan pedagang kaki lima merupakan fenomena yang sangat sulit dihadapi oleh pemerintah khususnya Kabupaten Temanggung. Keberadaan pedagang kaki lima semakin berkembang di perkotaan, sementara pemerintah kota tidak dapat menerima keberadaan Pedagang Kaki Lima di tengah-tengah Kota dan menggunakan fasilitas umum dan fasilitas sosial sehingga menciptakan buruknya tata kota.

Kabupaten Temanggung memiliki roda ekonomi dan kehidupan yang bergerak cepat, berkembang semakin maju sehingga pengelolaan pemerintah yang tepat agar perkembangan tersebut dapat terkontrol dengan baik dan mampu menjadikan Kabupaten Temanggung lebih sejahtera, maju, tertib dalam peraturan dan ketentraman masyarakat, hal ini menjadi tanggung jawab dari pemerintah Kabupaten Temanggung sebagai pemegang otoritas Pemerintah Daerah.

Bagi masyarakat yang tidak memiliki pendidikan yang disyaratkan untuk bekerja di lembaga-lembaga formal namun memiliki modal, mereka lebih banyak untuk memilih usaha dagang. Hal ini dilakukan dengan alasan usaha dagang tidak membutuhkan pendidikan formal yang terlalu tinggi, sehingga alternatif untuk berdagang merupakan salah satu mata pencaharian yang dipilih mereka. Berbicara mengenai usaha dagang, salah satunya adalah pedagang kaki lima atau PKL. Pedagang Kaki Lima adalah pedagang sektor informal dengan modal yang relatif sedikit berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang (jasa-jasa) usaha tersebut dilakukan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal.

Produktivitas Pedagang Kaki Lima sangat rendah jika dibandingkan dengan para saudagar di sektor ekonomi modern, namun mereka kondisinya jauh lebih superior dari pada para pengangguran proses pemberdayaan tidak bisa dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah, peran serta masyarakat yang diberdayakan sangatlah diperlukan.

Nilai PDRB Tahun 2013-2017 Atas Harga Konstan Tahun 2010

Kabupaten Temanggung

kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.871.059,36	2.817.953,21	2.952.682,34	3.047.963,51	3.105.053,83
B	Pertambangan dan Penggalian	92.520,80	95.804,47	98.311,19 1	103.312,76	107.693,22
C	Industri Pengelolaan	2.816.645,10	3.042.972,31	3.213.426,65	3.390.420,60 3	3.562.767,58
D	Pengadaan Listrik dan Ga	11.059,50	11.551,20	11.498,93	12.142,41	13.268,64
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.288,14	10.492,18	10.708,90	11.076,26	11.623,42
F	Konstruksi	513.555,74	537.587,76 5	583.260,43	616.827,10	677.337,84
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil	2.506.858,95	2.699.337,09	2.794.198,91	2.934.591,91	3.084.877,39

	dan Sepeda Motor					
H	Transportasi dan Pergudangan	539.878,18	568.600,74	613.424,36	652.232,98	675.719,05
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	179.241,36	188.554,34	201.299,78	212.590,36	228.950,64
J	Informasi dan Komunikasi	177.729,90	201.372,33	217.689,74	228.831,23	253.041,57
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	334.178,70	359.101,23	387.625,77	417.733,22	437.364,84
L	Real Estate	93.685,54	99.757,63	106.710,74	112.914,98	121.778,81
M,N	Jasa Perusahaan	35.783,82	39.261,61	42.446,28	44.735,51	48.390,40
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	341.071,86	341.603,70	358.689,45	368.628,49	377.512,44
P	Jasa Pendidikan	442.804,76	486.466,65	516.481,64	547.866,88	575.205,44
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	110.154,37	123.929,28	130.646,25	140.356,69	154.280,08

R,S,T,U	Jasa lainnya	222.826,88	243.333,84	250.293,19	268.520,73	289.599,61
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	11.299.342,97	11.867.679,59	12.489.394,54	13.110.745,64	13.724.464,81

Sumber : BPS Kabputaen Temanggung Tahun 2018

Berdasarkan harga konstan 2010 pada tabel diatas, nilai PDRB Teamanggung pada tahun 2017 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha, tanpa ada pengaruh dari kenaikan harga (inflasi). Nilai PDRB Temanggung tahun 2017 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 13,72 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 13,11 triliun rupiah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi pedagang kaki lima yang berdampak pada pendapatan pedagang kaki lima itu sendiri antara lain modal, media promosi, tenaga kerja, dan jumlah jam kerja. Modal merupakan salah satu faktor yang menajdi kendala utama berdirinya usaha. Modal dalam suatu usaha dapat berupa modal sendiri atau modal pinjaman. Hasil penelitian Wicaksono (2011) mengatakan, faktor modal seringkali memberikan pengaruh yang besar terhadap suatu usaha dagang, dimana dapat berdampak pada timbulnya permasalahan lain, seperti modal yang dimiliki seadanya, maka seorang hanya mampu membuka usaha dagang tanpa bisa memaksimalkan skala usahanya.

Faktor yang kedua yaitu media promosi, media promosi adalah media yang dipakai untuk mempromosikan produk (Salmiah, dkk 2020). Penggunaan media ini harus memperlihatkan tujuan promosi dan siapa target konsumennya agar tepat sasaran. Menurut (Kotler, 2006) promosi penjualan sebagai unsur utama dalam menjalankan pemasaran dengan berbagai alat insentif yang sebagian besar berjangka pendek, dengan dirancang untuk

merangsang pembeli dalam pembelian produk ataupun jasa tertentu dengan lebih cepat dan lebih besar yang dilakukan oleh konsumen atau pedagang. Promosi adalah suatu variabel yang terdapat pada bauran pemasaran yang berfungsi sebagai alat komunikasi perusahaan dengan konsumen, dan sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen untuk melkaukan pembelian pada produk atau penggunaan jasa (Lupiyoadi dan Hamdani, 2006).

Faktor yang ketiga yaitu tenaga kerja, biasanya permintaan akan tenaga kerja dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan hasil (Sony Sumarsono, 2003). Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain, naik turunnya permintaan pasar akan hasil produksi dari perusahaan yang bersangkutan, apabila harga barang-barang modal turun, maka biaya produksi turun tentunya mengakibatkan harga jual per unit barang akan turun.

Selain adanya tiga faktor yang harus dihadapi ooleh pedagang kaki lima yaitu, modal, media promosi dan tenaga kerja. Faktor yang ke empat yaitu jumlah jam kerja didalam suatu usaha memiliki hubungan langsung dengan pendapatan, dimana setiap penambahan waktu operasional yang dipengaruhi jumlah hasil produksi, akan semakin membuka peluang bagi bertambahnya pendapatan dari hasil penjualan.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima ini mampu menarik pusat perputaran perdagangan dikawasan pusat City Walk / trotoar Tugu Pancasila dan mampu memberikan kontribusi atas peningkatan pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Temanggung. Namun dilihat dari sisi lain Pedagang Kaki Lima sangat mengganggu kenyamanan tempat umum trotoar (pinggir jalan) yang menimbulkan permasalahan.

Pemerintah berhak melarang keberadaan PKL yang sembarangan dan tidak mengindahkan tata ruang Kota sesuai dengan peraturan yang ada bahkan sesuai dengan penataan kota. Salah satunya perkembangan Kota adalah perkembangan PKL dengan segala

bentuk dan jebus usahanya, PKL perlu adanya pembinaan dan pemberdayaan yang terarah dan berkesinambungan agar terciptanya suasana kota yang lebih baik. Penataan Kota dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima mengembangkan usahanya, menjaga ketertiban umum dan kebersihan lingkungan.

Produktivitas Pedagang Kaki Lima sangat rendah jika dibandingkan dengan para saudagar di sektor ekonomi modern, namun mereka kondisinya jauh lebih superior dari pada para pengangguran. proses pemberdayaan tidak bisa dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah, peran serta masyarakat yang diberdayakan sangata diperlukan.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, pedagang kaki lima, mengindikasikan adanya suatu persaingan antar pedagang dalam menjalankan aktivitas berdagang untuk memenuhi masing-masing pendapatan mereka. Maka dari itu peneliti berkeinginan untuk melaksanakan penelitian dengan mengambil judul “ Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Kaki Lima di City Walk Tugu Pancasila Temanggung”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maslaah sebagaimana diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh modal pedagang terhadap pendapatan Pedagang Kaki Lima di City Walk Tugu Pancasila Temanggung?
2. Bagaiman pengaruh media sosial terhadap pendapatan Pedagang Kaki Lima di City Walk Tugu Pancasila Temanggung?
3. Bagaimana pengaruh tenaga kerja terhadap pendapatan Pedagang Kaki Lima di City Walk Tugu Pancasila Temanggung?
4. Bagaimana pengaruh jumlah jam kerja terhdap pendapatan Pedagang Kaki Lima di City Walk Tugu Pancasila Kabupaten Temanggung?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh modal pedagang terhadap pendapatan Pedagang Kaki Lima di *City Walk* Tugu Pancasila Temanggung.
2. Mengetahui pengaruh media promosi antar pedagang terhadap pendapatan Pedagang Kaki Lima di *City Walk* Tugu Pancasila Temanggung.
3. Mengetahui pengaruh tenaga kerja antar pedagang terhadap pendapatan Pedagang Kaki Lima di *City Walk* Tugu Pancasila Temanggung.
4. Mengetahui pengaruh jumlah jam kerja antar pedagang terhadap pendapatan Pedagang Kaki Lima di *City Walk* Tugu Pancasila Temanggung.

D. Manfaat Penelitian

1. Didalam penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca mengenai kondisi sosial ekonomi Pedagang Kaki Lima Di *City Walk* Tugu Pancasila Temanggung.
2. Didalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan serta informasi ataupun menjadi referensi kepada peneliti lain untuk dapat mengembangkan penelitian selanjutnya.
3. Menjadi masukan kepada pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Temanggung pada saat mengambil kebijakan sektor informal khususnya pedagang kaki lima.